



Penataan Alun-Alun Terimbas Pengetatan Anggaran

KULONPROGO—Penataan Alun-Alun Wates dan pengadaan mesin pengolah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto di Kulonprogo dibatalkan menyusul kebijakan pengetatan anggaran oleh Pemerintah Pusat.

Yosef Leon, Jumali, & Triyo Handoko
redaksi@harianjogja.com

► **Alun-Alun Wates ditangguhkan untuk efisiensi anggaran sekitar Rp5 miliar.**

► **Pemda DIY tengah mencermati beberapa program fisik dan perjalanan dinas untuk dipangkas.**

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono, menjelaskan Dana Keistimewaan (Danais) DIY untuk penataan Alun-Alun Wates yang tak jadi dikucurkan karena kebijakan efisiensi bernilai sekitar Rp5 miliar. "Selain untuk penataan juga untuk membangun *landmark*, tetapi tidak jadi karena *refocusing*," kata dia.

► Halaman 10

Penataan Alun-Alun...

Triyono menerima kebijakan tersebut karena punya dasar hukum yang jelas yaitu Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. "Kami juga sudah koordinasikan ini dengan Paniradya Pati Kaistimewaan yang mengelola Danais," ungkapnya.

Pengurangan Danais juga menyebabkan batalnya pengadaan alat pengolah sampah sebesar Rp12 miliar. "Rencananya pengadaan ini untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di TPA Banyuroto," jelasnya.

"Selain ini ada program pembangunan fisik lainnya yang juga batal, tapi nilainya tidak sebesar dua program ini." Penjabat Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatswi, menyebut efisiensi anggaran juga berdampak pada pengurangan kegiatan Pemkab Kulonprogo seperti perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial. "Semuanya sudah diatur dalam Inpres tersebut, nanti detailnya akan dikoordinasikan bersama dalam implementasinya."

Layanan

Sekda DIY, Beny Suharsono, mengatakan selain Danais yang dengan jelas akan berkurang pada tahun ini dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,2 triliun, beberapa program fisik dan perjalanan dinas juga masih dicermati untuk dipangkas.

Pemda masih menyisir program untuk menentukan mana yang tetap berjalan dan mana yang harus ditunda. Ia mengatakan program yang diprioritaskan adalah yang tidak mengganggu aspek pelayanan publik.

Salah satu dampak efisiensi ini terlihat pada pengurangan jumlah program pembangunan, seperti program rumah tak layak huni (RTLH). Sebelumnya ada rencana mengangarkan pembangunan membangun 50 unit RTLH. Namun, tahun ini perbaikan hanya akan direalisasikan untuk 30 rumah, sedangkan 20 lainnya ditunda hingga tahun depan. "Tahun depan bisa menjadi prioritas untuk diselesaikan," jelasnya.

Selain memangkas program pembangunan, efisiensi juga dilakukan dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas. Pemda DIY akan memperketat persetujuan perjalanan dinas dan menggantinya dengan rapat daring atau Zoom meeting jika memungkinkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, menyatakan saat ini beberapa proyek terimbas munculnya inpres pengendalian anggaran. "Konsekuensi dari inpres ya tertunda beberapa waktu. Yang tadinya proses pengadaan Desember jadi mundur karena ada beberapa aturan baru. Tapi ada titik terang, semoga bisa segera terlaksana," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memastikan proyek Jalan Outer Ring Road (JORR) masih berjalan sesuai rencana. Rencananya JORR dibangun dengan panjang total 113,413 km yang terbagi dalam dua sisi utama, yakni sisi utara dan sisi selatan. Untuk sisi utara, proyek ini membentang di Kabupaten Sleman dengan panjang total 65,933 km. Secara rinci, ruas Sentolo-Minggir sepanjang 16,450 km, Minggir-Tempel 14,217 km, dan Tempel-Kalasan 35,257 km.

Ni Made mengatakan rencana pengembangan jalan lingkar luar ini mencakup wilayah dari Prambanan hingga Turi, serta Bantul. Beberapa ruas jalan akan mengalami pelebaran, sementara yang lain tetap menggunakan jalur eksisting, tapi tetap harus memenuhi kriteria JORR sesuai perencanaan.

"JORR tetap *on the track*, hanya saja penyelesaiannya bergantung pada pendanaan. Saat ini, dananya masih terbagi-bagi, apalagi dengan adanya instruksi Presiden," ujarnya.

Ia menekankan meskipun proyek itu belum bisa dieksekusi, tetapi tetap menjadi komitmen pemda. Ni Made juga menyoroti kondisi transportasi di Jogja yang semakin mendesak. Menurutnya, perlu ada peralihan dan pembagian jalur kendaraan agar tidak semua kendaraan besar masuk ke area kota.

Pelebaran Jalan

Kepala Bappeda Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, berharap anggaran Rp17 miliar yang saat ini telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pelebaran

Jalan Bantul pada 2025 tidak terkena pemangkasan anggaran. Pemkab menilai pelebaran Jalan Bantul, tepatnya mulai dari simpang Cepit hingga gapura masuk Kota Bantul sangat dibutuhkan. Selain karena sudah lama direncanakan dan masuk DIPA Kementerian PU, pelebaran jalan tersebut juga akan menekan angka kecelakaan yang selama ini terjadi di ruas jalan tersebut.

Inpres No.1/2025 telah membuat anggaran Kementerian PU dipangkas Rp82 triliun atau 74% dari total pagu Rp110,95 triliun pada 2025. Pemkab Bantul juga menunda sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa pada 2025.

Pelaksana Tugas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Jimmy Arlan Manumpak Simbolon, mengungkapkan pelebaran jalan sepanjang 930 meter dari simpang Cepit hingga gapura masuk Kota Bantul sudah direncanakan sejak 2022. "Saat itu terbentuk anggaran dari APBN," ujarnya.

Pemerintah Pusat telah memberikan kejelasan akan ada anggaran Rp17 miliar dari APBN untuk realisasi pelebaran jalan tersebut.

Belum Disepakati

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Andarini, menjelaskan saat ini belum disepakati berapa besar anggaran yang dipangkas untuk menindaklanjuti Inpres tersebut. "Tindak lanjut Inpres sedang akan dikoordinasikan."

Koordinasi ini akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja. Di samping itu, jawatannya juga masih menunggu regulasi pendukungnya, yakni Peraturan Menteri Keuangan. "Kami koordinasikan sambil menunggu PMK-nya," katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Supriyanto, terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan persiapan penyelenggaraan Porda 2025. Pasalnya, kebijakan penundaan pengadaan barang dan jasa maupun efisiensi anggaran ditakutkan akan berpengaruh terhadap persiapan penyelenggaraan.

(Lugen Subarkah & David Murniawan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005